

Press Brief

Seminar Nasional Proyeksi Ekonomi Indonesia 2026

Menata Ulang Arah Ekonomi Berkeadilan

Jakarta, Kamis, 20 November 2025

Menara Danareksa

Seminar Nasional Proyeksi Ekonomi Indonesia 2026 yang diselenggarakan INDEF mengangkat tema “Menata Ulang Arah Ekonomi Berkeadilan”. Acara dibuka oleh sambutan dari **Eko Listiyanto-Direktur Pengembangan Big Data INDEF** yang menyampaikan bahwa perekonomian Indonesia telah berada dalam fase stagnasi pertumbuhan di kisaran 5 persen selama lebih dari satu dekade yang menunjukkan bahwa mesin pertumbuhan kita memerlukan perawatan ulang—bahkan, mungkin rekonstruksi arah pembangunan secara menyeluruh. Pertanyaan berikutnya yang penting menurut Eko adalah apakah pertumbuhan yang kita capai selama ini benar-benar menghadirkan keadilan sosial-ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaan ini jugalah yang menjadi dasar pemilihan tema pada Proyeksi Ekonomi Indonesia 2026.

Pada kegiatan ini **Abdul Muhaimin Iskandar - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat** hadir memberikan *keynote speech*. Abdul Muhaimin Iskandar menyampaikan bahwa Pemerintah melakukan perubahan pendekatan kebijakan untuk mengatasi kemiskinan yaitu memperbaiki desain ekonomi nasional dari *trickle-down effect* menjadi pertumbuhan yang berbasis pada pemberdayaan. Pemerintah melakukan transformasi pendekatan pengentasan kemiskinan dari bantuan sosial menjadi paradigma pemberdayaan. Negara akan hadir secara langsung untuk mendorong peningkatan kapabilitas, kemandirian, dan pertumbuhan kesejahteraan secara berkelanjutan sesuai mandat Pasal 33 dan 34 UUD 1945.

Keynote speech selanjutnya disampaikan oleh **Suharini Eliawati - PLH Sekda Provinsi Jakarta yang hadir mewakili Gubernur Provinsi Jakarta**. Suharini menyatakan bahwa untuk mengatasi informalitas, Pemerintah Jakarta saat ini tengah menghitung *gig economy* dan industri kreatif Jakarta. Tujuannya adalah untuk memahami kontribusi sektor-sektor ini dan memberikan payung perlindungan yang lebih baik bagi para pekerja informal. Sementara itu, untuk mengatasi kemiskinan, Pemerintah Provinsi Jakarta telah memberikan intervensi dengan memberikan berbagai bentuk bantuan sosial seperti Kartu Jakarta Pintar, subsidi pangan, dan lainnya.

Proyeksi Ekonomi Indonesia 2026, hasil analisis yang dilakukan tim INDEF, disampaikan oleh **Eisha Maghfiruha Rachbini-Direktur Program INDEF**. Berikut adalah hasil proyeksinya:

- **INDEF memproyeksikan ekonomi 2026 tumbuh sebesar 5,0 persen.** Tingkat pertumbuhan ini lebih rendah dari target pemerintah dalam asumsi makro APBN 2026 sebesar 5,4 persen. Hal ini dipengaruhi oleh: 1. Ketidakpastian global meningkat (geopolitik, perlambatan China, fragmentasi perdagangan) sehingga menekan ekspor, arus modal, dan nilai tukar; 2. Pemulihan konsumsi domestik masih rapuh akibat tekanan harga pangan—energi dan daya beli yang belum pulih kuat; 3. Investasi belum ekspansif dan kurang produktif, masih bertumpu pada proyek padat modal dengan efek pengganda kecil; dan 4. Pasar tenaga kerja rapuh (didominasi informal, skill mismatch), sehingga kenaikan pendapatan rumah tangga terbatas.
- **Inflasi pada 2026 diproyeksikan INDEF berada pada level 3,0 persen (yoy).** Inflasi pada 2026 diproyeksikan akan lebih tinggi akibat permintaan yang membaik namun penawaran yang rigid, terutama dalam sektor pangan dan energi. Selain itu ada beberapa hal yang ikut menyumbang

peningkatan inflasi di 2026 diantaranya, yaitu: 1. Program stimulus seperti MBG diprediksi mulai berdampak pada 2026. Tanpa perbaikan kapasitas produksi, penguatan permintaan justru berpotensi menambah tekanan inflasi dalam jangka pendek; 2. Komponen *Volatile Food* menjadi pendorong utama lonjakan inflasi 2026 karena sistem distribusi pangan nasional yang panjang dan tidak efisien, sehingga harga mudah bergejolak; dan 3. Rencana pemerintah dalam penyesuaian tarif listrik, BBM nonsubsidi, dan subsidi LPG akan menghasilkan inflasi dorongan biaya produksi, diperburuk oleh depresiasi Rupiah yang meningkatkan imported inflation untuk energi dan bahan baku industri.

- **INDEF memproyeksikan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS pada 2025 sebesar Rp17.000/US\$.** Nilai Tukar Rupiah pada 2026 diproyeksikan melemah di kisaran Rp17.000, karena pengaruh tekanan eksternal dan domestik., yaitu: 1. Geopolitik Timur Tengah, perlambatan ekonomi Tiongkok, dan fragmentasi perdagangan meningkatkan aversi risiko investor dan melemahkan mata uang emerging markets; 2. Defisit neraca perdagangan non-komoditas, tingginya ketergantungan impor bahan baku dan pangan, serta kebutuhan pembiayaan utang pemerintah menambah tekanan pada rupiah; dan 3. Kebutuhan impor energi akibat subsidi yang tidak efisien menciptakan structural demand for USD.
- **Tingkat kemiskinan dan rasio gini diproyeksikan INDEF akan turun pada 2026. Kemiskinan akan turun ke 8,45% dan Rasio Gini ke 0,373,** namun laju penurunan yang lambat membatasi penguatan konsumsi inklusif dan membuat rumah tangga miskin tetap rentan terhadap guncangan. Berikut adalah hal yang mempengaruhi kemiskinan dan ketimpangan di 2026: 1. Pertumbuhan didorong konsumsi dan proyek kapital-intensif (hilirisasi, infrastruktur besar), yang menyerap tenaga kerja berkeahlian tinggi. Manfaat pertumbuhan tidak merata dan lebih banyak terkonsentrasi pada kelompok menengah-atas; 2. Di sisi lain, struktur pasar kerja yang didominasi sektor informal dan upah rendah membatasi peningkatan pendapatan kelompok rentan, sementara tekanan harga pangan dan energi semakin menekan daya beli mereka; dan 3. Struktur pajak dan belanja publik yang kurang progresif melemahkan redistribusi, sehingga Rasio Gini yang masih tinggi menahan permintaan agregat dan membuat pertumbuhan ekonomi kurang efektif menurunkan kemiskinan.
- **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diproyeksikan INDEF turun ke 4,75% pada 2026, namun penurunan ini belum mencerminkan perbaikan kualitas pekerjaan maupun ketahanan pasar tenaga kerja,** karena: 1. Penurunan TPT didorong oleh percepatan proyek infrastruktur, hilirisasi industri, dan program publik berskala besar (termasuk MBG dan padat karya) yang menciptakan banyak pekerjaan sementara; 2. Turunnya pengangguran lebih banyak berasal dari pekerjaan informal atau berupah rendah, bukan dari penyerapan tenaga kerja formal yang berkualitas; dan 3. Di sisi penawaran, masuknya angkatan kerja baru tidak diimbangi dengan kecocokan keterampilan sehingga banyak terserap pada pekerjaan berupah rendah atau kontrak temporer, sementara otomatisasi di manufaktur dan jasa meningkatkan risiko tergesernya pekerjaan berkeahlian rendah.

Pada Seminar Proyeksi Ekonomi 2026: Menata Ulang Arah Ekonomi Berkeadilan, para narasumber menegaskan hal penting yang perlu di perhatikan, yaitu:

1. Aviliani-Ekonom Senior INDEF

“Untuk mendukung pertumbuhan tinggi, sektor yang perlu menjadi prioritas adalah sektor pariwisata karena kontribusi UMKM pada sektor ini besar, sehingga perlu membangun ekosistem pariwisata, dan sektor berbasis hilirisasi karena mampu menyerap tenaga kerja, sehingga kebijakan pemerintah perlu diarahkan untuk menarik investor pada sektor prioritas tersebut.” Aviliani juga menegaskan pentingnya tata kebijakan bahwa “Kebijakan tidak bisa

disamaratakan, harus disesuaikan dengan kondisi tiap daerah dan potensi ekonomi daerah yang bersangkutan.”

2. Medrilzam- Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas

“Kolaborasi merupakan kata kunci, tanpa kolaborasi antar pihak, instansi pemerintah pusat, pemda, masyarakat dan dunia usaha, pencapaian ekonomi berkeadilan akan sulit dicapai. Selain itu, perlu didukung dengan debirokratisasi (deregulasi perizinan) merupakan kunci penting dalam mencapai pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan memperoleh akses untuk menata ulang arah ekonomi berkeadilan.”

3. Prof Didin. S Damanhuri- Pendiri dan Ekonom Senior INDEF

“Transformasi ekonomi berkeadilan (pertumbuhan melalui pemerataan) di tingkat implementasi sangat penting karena saat ini impementasinya masih dihadapi tantangan besar, baik dari sisi fiskal, perbankan dan moneter, tata ruang dan wilayah. Sehingga perlu upaya yang konkrit dalam melakukan transformasi tersebut.”

4. Eisha Magfiruha Rachbini-Direktur Program INDEF

“Jika ingin pertumbuhan ekonomi di atas 5% akan tercapai, jangan melupakan potensi daerah dan kapasitas daerah dalam mendorong pertumbuhan. Pemerintah harus mengatasi ketimpangan antar daerah, termasuk ketimpangan fiskal daerah, mendorong pemerataan akses di daerah, agar ekonomi tumbuh sejalan dengan peningkatan pendapatan Masyarakat secara merata”

INDEF

Kamis, 20 November 2025

Narahubung: Sarwo Edhi (+62-813-8047-7878)